

PENTINGNYA MATA KULIAH MULTIKULTURALISME BAGI BANGSA INDONESIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRITIS PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

**Oleh
Yoseph Andreas Gual**

Realitas bangsa Indonesia yang berkepulauan sejak awal telah majemuk. Kemajemukan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bersama. Karena lahir dan hidup bersama dengan kemajemukan, masyarakat Indonesia sejak awal sudah dapat hidup berdampingan walau berbeda satu dengan yang lain. Namun kini, kehidupan harmonis yang dihayati sejak dulu mulai tergerus oleh berbagai pemikiran dari luar yang dapat mencabik kehidupan berbangsa dan bernegara karena penghargaan atas perbedaan mulai menyusut. Karena itu, dibutuhkan sebetulnya pendidikan multikultural bagi semua masyarakat Indonesia di berbagai sektor terutama anak-anak. Pendidikan multikultural tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak di semua sektor dan jenjang.

A. Multikulturalisme sebagai Sebuah Konsep

Sejak awal munculnya, multikulturalisme dianggap sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik kepada etnik lain – dengan memberikan keleluasaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya dan ekspresi budaya etnik itu merupakan salah satu kontribusi bagi pengembangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2009). Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa multikulturalisme dapat dilihat dari perspektif sosiologis dan perspektif politik. Dari perspektif sosiologi, multikulturalisme merupakan suatu fakta sosial atau kondisi multikultural. Sementara dari perspektif politik, multikulturalisme merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan keberagaman budaya etnik dalam masyarakat.

Multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap entitas budaya dan pendukungnya yang beragam. Cara pandang ini menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman kebudayaan beserta pendukungnya

sehingga dapat menjalankan fungsi hidup bersama dengan sebuah sistem yang harmonis (Arif, 2021). Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang tersisih dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsa (Firman, 2015). Dengan demikian dalam masyarakat multikultural, setiap kebudayaan mendapatkan penghargaan sekaligus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondisi sosia-kultural yang harmonis.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan di mana fungsinya merupakan pedoman kehidupan manusia sehingga konsep multikulturalisme tidak sama dengan konsep keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Penekanan multikulturalisme terletak pada kesederajatan aneka ragam kebudayaan lengkap dengan berbagai suku bangsa pendukungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Parekh memetakan masyarakat multikulturalisme dalam lima kategori yang jelas. Pertama, isolasionis yang mengacu pada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal antara satu dengan yang lainnya. Kedua, akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Ketiga, otonomis yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelima, kosmopolitan yakni masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah

masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit terhadap budaya tertentu sebaliknya bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Suharno, 2021).

Multikulturalisme menekankan pada keragaman sosial yang setara di mana terjadi hubungan timbal balik dalam masyarakat. Hubungan resiprokal ini merupakan hal yang substansial. Syarat agar hubungan kesalingan ini berjalan harmonis dibutuhkan tiga syarat mendasar yang menjadi kompetensi normatif yakni kompetensi kebudayaan, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi kepribadian (Arif, 2021). Kompetensi kebudayaan merupakan kumpulan pengetahuan yang memungkinkan bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan komunikatif dapat membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsensus bersama. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan yang sah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat multikultural yang memungkinkan bagi siapapun untuk terlibat dalam tindakan komunikatif sehingga membentuk solidaritas yang harmonis. Sedangkan kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat berpikir, berbicara dan bertindak sehubungan dengan partisipasinya dalam hubungan timbal balik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Dari ketiga kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang dalam masyarakat multikultural ini maka dapat dikatakan bahwa multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan atau isu-isu sektarian yang dapat mengancam keharmonisan hidup bersama.

Multikulturalisme lahir dari perubahan sosial dan realitas kehidupan manusia sendiri yang disambut dengan berbagai kebijakan negara. Namun demikian ada tiga faktor pendorong utama hingga multikulturalisme dapat diterima dan diserap oleh hampir semua negara yakni perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi (Tilaar, 2005). (a) Dalam sejarah kehidupan manusia, ada sebuah masa di mana hak kemanusiaan seseorang atau sekelompok orang ditindas oleh rezim

penjajah, otoritarianisme dan pemerintah kerajaan absolut. Namun setelah perang dunia kedua, PBB mencetuskan kesepakatan bersama antarbangsa pada tahun 1948 yakni Universal Declaration of Human Right. Deklarasi ini merupakan permulaan dari gerakan lama dan panjang dalam menegakan hakikat hidup manusia yang sama dan setara tanpa membedakan warna kulit, agama, kepercayaan dan asal-usul. (b) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan dunia seperti sebuah desa global (global village). Ruang dan waktu semakin dipersingkat malah saat ini seperti sudah tidak menjadi sebuah masalah bagi manusia untuk saling berhubungan. Situasi ini membuat hubungan antarmanusia yang beragam dapat terjadi dengan mudah, murah dan cepat. Inilah globalisasi di mana budaya baru datang begitu cepat ke suatu tempat dan budaya setempat tidak bisa menolak budaya baru tersebut. Sebaliknya, budaya setempat dapat memperkenalkan diri kepada orang dari budaya lain di tempat asalnya atau ke tempat lain. Dalam situasi semacam ini, kemungkinan benturan antarbudaya sangat memungkinkan. (c) Demokratisasi menjamin semua warga negara memberikan pendapat dan suaranya tanpa perlu khawatir. Hal ini menjadi faktor lain yang mendorong perkembangan multikulturalisme. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang beragam dan dengan pengakuan terhadap keberagaman budaya berarti mengakui juga hak asasi manusia. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Karenanya, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, globalisasi dan demokratisasi yang menjadi ciri utama dari kehidupan sosial abad 21.

Menurut Berghe (PGSD/MI, 2020) masyarakat multikulturalis memiliki beberapa sifat (1) terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok sub kebudayaan berbeda satu sama lain; (2) memiliki tatanan sosial yang terbagi dalam lembaga; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara anggota; (4) terdapat integrasi sosial yang tumbuh berdasarkan paksaan dan saling membutuhkan dalam ekonomi dan (5) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Selain itu, terdapat tiga masalah pokok yang berkaitan dengan pemikiran multikulturalisme yakni identitas kelompok, globalisme dan nasionalisme dalam

kemasan negara bangsa (Tilaar, 2005). Masalah identitas kelompok muncul manakala globalisasi menyebar ke semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai etnis dan kelompok merasa khawatir identitas kelompoknya akan menghilang karena maraknya budaya massa. Kekhawatiran ini mendorong kelompok melakukan resistensi dan penguatan identitas kelompok. Efek lanjutnya adalah makin menguatnya polarisasi antara kekuatan kelompok dalam negara bangsa. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan negara bangsa yang kembali tersekat-sekat. Globalisasi juga pada akhirnya meninggalkan masalah baru bagi budaya nasional dan budaya lokal/kelompok.

Dalam situasi semacam ini dibutuhkan sikap kritis yang relevan dikembangkan dalam masyarakat multikulturalis yakni: (a) mengembangkan sikap toleransi dalam menghadapi segala perbedaan budaya, ras, suku, agama agar tercipta integrasi dalam masyarakat. (b) meninggalkan sikap prasangka buruk atas suku, bangsa, ras, agama yang berbeda yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. (c) Mengembangkan sikap cinta tanah air dengan tulus akan membawa negara pada kesatuan dan persatuan serta mengesampingkan segenap perbedaan dan (d) mengembangkan kesadaran setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki peranan masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya (PGSD/MI, 2020).

B. Faktor-Faktor Penyebab Multikulturalisme di Indonesia dan Implikasinya

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 17.508 (Australia, 2018). Penduduk Indonesia tahun 2022 sebanyak 275 773,8 jiwa (BPS, 2022a) yang terdiri atas 1.340 suku bangsa (Welianto, 2020) di antaranya 633 kelompok suku bangsa besar (BPS, 2022b). Dengan jumlah semacam ini, Indonesia menjadi negara keempat terpadat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Hal ini juga yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang pendudukannya multi-etnis di dalam hamparan luas dan banyaknya pulau yang ada.

Keragaman masyarakat Indonesia sebenarnya sudah disadari oleh para *founding fathers* bangsa ini ketika mereka membentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kesadaran itu bermula dari Sumpah Pemuda yang mereka ikrarkan jauh sebelum terbentuknya negara ini yakni pada 28 Oktober 1928 dengan menandatangani tiga point utama yakni keberagaman negara bangsa yang mereka cita-cita itu perlu dipersatukan oleh tanah air yang satu, bangsa yang satu dan bahasa yang satu. Kesadaran ini kemudian dilanjutkan dan disahkan menjadi motto negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu. Dengan motto ini, para pendiri bangsa ini menyadari keragaman masyarakat Indonesia yang ingin mereka bentuk namun pada saat yang sama secara simultan mengikatnya dalam semboyan ini agar semua masyarakat sadar identitas sesungguhnya dari ke-Indonesia-an ini yakni keberagaman atau multikulturalisme.

Keragaman masyarakat Indonesia yang multi-etnis semacam ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang sudah ada semenjak dahulu kala sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor tersebut yakni (Putri, 2020):

1. Faktor sejarah masyarakat Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah. Kekayaan ini menarik banyak bangsa dari luar seperti China, Arab, India, Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang untuk datang ke Indonesia. Kedatangan mereka selain mencari rempah-rempah dan berdagang namun ada juga yang menetap di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadi perkawinan lintas suku yang menambah jumlah budaya dan ras di Indonesia.

2. Faktor pengaruh kebudayaan asing

Akibat dari banyak jumlah suku bangsa yang datang ke Indonesia menyebabkan terjadinya percampuran suku bangsa yang menyebabkan semakin kaya dan beragamnya suku bangsa dan etnis di Indonesia.

3. Faktor geografis

Secara geografis, letak Indonesia berada pada posisi yang strategis karena di antara dua benua – Asia dan Australia dan dua samudera – samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur perdagangan sejak dahulu kala. Sebagai Jalur perdagangan, Indonesia menjadi tujuan dan perantara perdagangan para

pedagang yang datang dari China, Arab, India dan Eropa. Hal ini mendorong pengaruh multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia.

4. Faktor fisik dan geologi

Secara geologis, ada tiga lempengan benua yang menghimpit Indonesia yakni Asia, Australia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkepulauan terbesar di dunia yang membuat penduduk dan budayanya berbeda. Kondisi fisik ini mempengaruhi tipe manusia Indonesia yang terbagi menjadi tipe Asiatis, Tipe Peralihan dan Tipe Austrialis.

5. Faktor iklim

Keadaan iklim dan geografis masyarakat Indonesia yang beragam mempengaruhi manusia Indonesia pula. Misalnya, manusia pegunungan dengan cuaca yang sejuk mempengaruhi manusia Indonesia di sana menjadi lebih tenang dan ramah dalam hidup dan kebudayaannya.

Situasi multikulturalis masyarakat semacam ini memberi dua potensi dampak bagi Indonesia. Potensi multikulturalisme ini jika dikelola dengan baik akan keanekaragaman masyarakat dan geografis bisa menjadi kekayaan sekaligus kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang sangat kuat dan berlimpah. Namun keragaman ini juga menyimpan potensi konflik yang luar biasa besar. Jika tidak dikelola dengan baik potensi konflik ini akan meledak dan akan menyebabkan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam.

Selama ini ada banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia akibat keanekaragaman masyarakatnya. Kendala utama dialami masyarakat Indonesia dalam silang budaya (Firman, 2015) seperti (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat sehingga rendahnya daya tangkal terhadap budaya asing; (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya. Selain itu, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis: krisis

kepemimpinan, krisis ideologi, krisis jati diri, krisis moral, dan krisis nasionalisme (Sudharto, 2012). Krisis ini berpangkal pada rendahnya komitmen partai politik terhadap kepentingan bangsa.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan multi kultural yang sehat, sehingga toleransi dan apresiasi antarbudaya meningkat. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat juga diatasi dengan meningkatkan peran media komunikasi untuk melakukan sensor, strategi pendidikan yang berbasis budaya. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terinternalisasi dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal maupun non formal. Khususnya pendidikan di sekolah diperlukan adanya paradigma baru yang dapat menyajikan model & strategi pembelajaran yang dapat menseimbangkan kehidupan masyarakat dari berbagai latar budaya (Firman, 2015).

Selain itu, terdapat tiga pola dasar untuk membangun integritas bangsa di tengah-tengah pluralisme etnik/pluralisme kultural (Sudharto, 2012) yaitu: 1) "Melting-pot" (arena kehidupan, terutama politik dijadikan ajang meleburnya berbagai kelompok etnik/cultural); 2) "*Mainstreaming/assimilation, conformity, compensatory*" (budaya induk yang statusnya lebih tinggi dipakai sebagai standar, kelompok-kelompok lain mengikuti kalau perlu diupayakan kompensasi-kompensasi terutama terhadap kelompok yang lemah dan berkekurangan). 3) "*Multi-cultural model*" (masing-masing kelompok etnik/ kultural memiliki kedudukan sama dan disorong berkembang dan pada saat yang sama upaya-upaya struktural diciptakan sebagai basis bersama membangun masyarakat bangsa).

C. Pendidikan Multikulturalisme

Dengan konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural semacam ini maka negara perlu memberikan kesadaran kepada semua warga negara tentang pentingnya hidup bersama dengan damai dalam perbedaan. Namun hal tersebut sangat sulit dilakukan jika tidak diatur secara sistematis, terencana dan terstruktur. Rancangan tersebut harus menyentuh semua anak bangsa di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tugas ini dilaksanakan oleh semua komponen yang ada

dalam masyarakat. Satu hal penting agar menyentuh semua lapisan masyarakat maka dilakukan secara formal. Hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan multikulturalisme dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tidak hanya formal melainkan non formal dan informal di keluarga-keluarga. Khusus di lembaga pendidikan formal, pemerintah bertanggung jawab menyediakan kurikulum yang di dalamnya menyediakan mata pelajaran atau mata kuliah khusus tentang multikulturalisme khas Indonesia sehingga semua peserta didik, guru/dosen dan pegawai dapat memahami dan menjalankan program ini.

Pendidikan multikulturalisme sebenarnya sudah ada sejak dahulu yang terdapat dalam pelajaran/mata kuliah lain seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Namun bila ditelusuri lebih lanjut dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, mengungkapkan pendidikan multikultural di Indonesia belum berjalan sebagai mana mestinya, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti (Kons, 2018): (1) sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada rakyat, (2) tidak menumbuhkan kreatifitas peserta didik sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, (3) korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merasuk ke dalam berbagai lini, (4) pemikiran barat yang tidak diadaptasi sebelumnya, (5) ketimpangan dari satus sosial, ekonomi dan domili, (6) kurikulum sarat ilmu pengetahuan dan belum tentu berguna dalam kehidupan, (7) siswa kurang bergairah dalam belajar karena kurang berorientasi budaya.

Oleh karena itu, penting untuk disediakan secara khusus pendidikan multikulturalisme dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang agar pembahasannya lebih luas sekaligus mendalam. Hal ini disebabkan karena isu ini sangat luas dan perlu ditelusuri tidak hanya soal teori namun juga perlu dipraktekkan di dilihat prakteknya dalam masyarakat.

Pentingnya pendidikan multikulturalisme di semua lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan formal karena pendidikan multikulturalisme memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Manfaat pendidikan multikulturalisme dapat dilihat sebagai (a) sarana alternatif pemecahan konflik; (b) Sarana sosialisasi bagi peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya; (c) Sebagai

landasan pengembangan kurikulum nasional; (d) Menuju masyarakat Indonesia yang multicultural (Puspita, 2018). Selain itu, terdapat keutamaan lain dari pendidikan multikulturalisme bagi masyarakat khususnya peserta yakni (1) Memberikan terobosan baru dalam ruang pendidikan yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka peserta didik sehingga tercipta manusia (warga negara) antar budaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (nonviolent); (2) Menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat; (3) Model pembelajaran multikultural membantu pendidik dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk; (4) Memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa SARA yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka (Susanti, 2020).

Pendidikan multikultural dapat difahami sebagai sebuah sistem pendidikan dimana pola dan sistem pembelajaran memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi (Firdaus et al., 2015). Sementara menurut Azumardi Azra, pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Ibrahim, 2013). Perspektif yang mirip juga dikemukakan Yanni Puspita bahwa pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran agama (Puspita, 2018). Pengertian-pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pendidikan multikulturalisme dilakukan sebagai sebuah proses yang tiada akhir.

Dengan demikian maka, pendidikan multikulturalisme semestinya berkaitan dengan tiga hal penting (Hanum, 2004) yakni (1) Kesadaran akan nilai pentingnya Keragaman. Peserta didik perlu memiliki kesadaran bahwa semua peserta didik

berbeda dari usia, agama, gender, suku, etnis, ras dan budaya yang tidak bisa ditolak. Namun perbedaan itu bukanlah sebuah halangan untuk seseorang mendapatkan haknya dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut harus bisa diterima dalam sebuah kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup bersamanya secara berdampingan dalam suasana damai. (2) Gerakan Pembaharuan Pendidikan. Pendidikan multikulturalisme bukan sekedar praktik aktual dalam mata kuliah namun mencakup semua aspek pendidikan. (3) Proses Pendidikan. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses yang tidak sekali jadi dan tuntas melainkan proses yang berjalan terus menerus di mana dilakukan untuk memperbaiki prestasi dan cara hidup bukan untuk meningkatkan skor.

Menurut Manan, penanaman nilai-nilai multikulturalisme bukanlah sistem pendidikan itu sendiri, namun proses yang penanaman atau transformasi nilai melalui proses pendidikan formal maupun non formal, karena pendidikan adalah penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan menggunakan pranata-pranata seperti sekolah-sekolah yang disengaja diciptakan untuk tujuan tersebut (Firdaus et al., 2015). Penanaman nilai multikulturalisme dapat dilakukan terhadap 3 ranah pendidikan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor (Firdaus et al., 2015). Sikap (afektif) adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan tentang budaya, toleransi budaya, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya lain, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Kognitif (kognitif) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan psikomotorik (psikomotorik) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran dengan memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, dan menjelaskan dinamika kultural

Calarry Sada menjelaskan pendidikan multikultural memiliki empat makna atau model (Firman, 2015), yaitu : (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

James Banks mengemukakan bahwa pendidikan multikultural punya lima dimensi yang saling terkait yang dapat membantu mewujudkan berbagai program agar peserta didik dapat memahami perbedaan di antara mereka (Ibrahim, 2013). Kelima hal tersebut adalah (a) Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh pendidik untuk memberikan keterangan dengan point utama pembelajaran multikulturalisme. (b) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para pendidik membantu peserta didik untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. (c) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Pendidik melakukan banyak usaha untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. (d) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah peserta didik dari berbagai kelompok. (e) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda.

Dalam penerapannya pendidikan multikultural perlu mengedepankan tiga prinsip dasar seperti yang dikemukakan Tilaar yakni (1) Pendidikan multikultural didasar pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). 2) Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang

menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. 3) Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawanya (Puspita, 2018). Selain itu juga perlu diperhatikan prinsip lain dalam pendidikan multikulturalisme seperti yang dikemukakan oleh Will Kymlicka yakni (1) Hak-hak individual dan hak-hak kolektif dalam masyarakat; (2) Kebebasan bagi individual dan budaya yakni setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan mengembangkan dan memajukan budayanya; (3) Keadilan dan hak-hak minoritas; (4) Jaminan minoritas bisa berbicara dan terwakilkan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif; (5) Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan (Firman, 2015).

Hal ini penting agar tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat tercapai seperti (Ibrahim, 2013) yakni (1) Untuk memfungsikan peranan dunia pendidikan dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam; (2) untuk membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan peserta didik dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selain itu, pendidikan multikulturalisme juga bertujuan untuk Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda (Puspita, 2018).

D. Penutup

Indonesia merupakan negara bangsa yang penduduknya multikultur. Tidak mudah mengelola bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak dan plural seperti Indonesia. Namun hal tersebut merupakan sebuah keharusan jika ingin negara bangsa ini bisa tetap berdiri sampai tahun-tahun ke depan. Dibutuhkan usaha bersama

dari semua komponen masyarakat sejak manusia Indonesia sejak usia dini untuk menyedarkan keanekaragaman ini.

Salah satu cara yang bisa dilaksanakan oleh negara secara formal untuk menyentuh anak bangsa sejak dini yakni dilakukan melalui lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan formal dengan menyediakan mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang berbicara tentang multikulturalisme khususnya multikulturalisme di Indonesia. Selain itu, semua lembaga swasta maupun negara perlu menyediakan format-format pendidikan nonformal lain yang dilakukan secara regular setiap tahun bagi anggota-anggotanya agar dapat memahami arti pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pemahaman akan indahny hidup bersama secara damai dengan segala perbedaan maka Indonesia bisa maju ke depan menyongsong masa depan.

Referensi

- Arif, M. (2021). *Model Kerukunan Umat Beragama*. Para Citra Madina.
- Australia, K. (2018). *Indonesia*. Keduataan Besar Republik Indonesia Di Canberra, Australia. <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>
- BPS. (2022a). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- BPS. (2022b). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Firdaus, Yasin, F., & Anggreta, D. K. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyiasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia. *ASEAN Comparative Education Research Network Conference*, 1756–1767.
- Firman, F. (2015). SILANG BUDAYA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA. In *Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang* (Vol. 4, Issue 1).
- Hanum, F. (2004). Multikulturalisme Dan Pendidikan. *Multikulturalisme Dan Pendidikan*, 1–17.
- Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1), 129–154. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573%0Ahttp://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Kons, F. M. (2018). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA. In *Fakultas Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Padang* (Vol. 4, Issue 1).
- Liliweri, A. (2009). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (2nd ed.). LKIS.
- PGSD/MI, T. D. (2020). *Memperkuat Identitas Bangsa melalui Pendidikan Multikultural:*

Konsep - Prinsip - Implementasi. Guepedia.

- Puspita, Y. (2018). Pentingnya Pendidikan Multikultural. *Seminar Nasional Pendidikan Universitas PGRI Palembang*, 285–291.
- Putri, A. (2020, February 17). 5 Faktor Keberagaman Bangsa Indonesia. *Kompas.Com, Skola*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/201500469/5-faktor-keberagaman-bangsa-indonesia?page=all>.
- Sudharto. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(1), 121–142. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/593>
- Suharno. (2021). *Pendidikan Multikulturalisme, Konsep, Tata Kelola dan Praktek Penyelesaian Konflik Multikultural* (D. Prasetyo (ed.)). Insania.
- Susanti, Y. (2020). Pembelajaran Multi Kultural Di Sekolah. *Journal Of Arts Research*, 1, 1–15. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2535>
- Tilaar, H. A. R. (2005). Pendidikan dalam Multikulturalisme. In *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*. Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Welianto, A. (2020). Daftar Suku Bangsa di Indonesia. *Kompas.Com, Skola*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>